Form A.09.00

Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)		Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh						
	Anggota Direksi		Anggota Dew	an Komisaris	omisaris Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:51:25 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 1

Form A.00.00 TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL Raya Sukowati No 249 Sragen

Nomor Telepon : (0271) 892662

Penjelasan Umum : BPR pada prinsipnya sudah melakukan segala upaya untuk

mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan atau regulasi yang berlaku, namun BPR belum sepenuhnya menyeluruh di setiap lini, kedepan BPR akan terus berupaya untuk mentaati regulasi-regulasi yang ada, baik regulasi dari regulator maupun regulasi yang lain

yang berkaitan dengan perbankan

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:45:30 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 1

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab		
1	TITON DARMASTO, S.H., M.M	Direktur Utama	Direktur Utama		
	Ti	ndak Lanjut Rekom	nendasi Dewan Komisaris		
Saat ini	aat ini telah dilakukan Pemenuhan Direktur YMFK dan Direktur Bisnis				
	Р	enjelasan Lebih La	anjut (Apabila diperlukan)		

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:47:21 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 1 dari 1

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	HARYANTI, S.Sn., M.Si	Komisaris Utama	Melakukan pengawasan efektif kepada Direksi terkait pengelolaan BPR
2	Drs. SUHARNO,M.M., Akt	Komisaris Utama dan Independen	Melakukan pengawasan efektif kepada Direksi terkait pengelolaan BPR

Rekomendasi Kepada Direksi

Telah terpenuhi Dewan Komisaris Bank Djoko Tingkir

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:47:37 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 1 dari 1

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:47:53 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 1

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:48:05 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 1 dari 1

Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:48:24 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 1 dari 1

Form A.02.10

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:48:37 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 1

Form A.02.20

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:48:49 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 1

Form A.03.10

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan			
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham	
1	TITON DARMASTO, S.H., M.M	tidak ada	tidak ada	tidak ada	

		/ inggota Direct Lain	7 triggota Donam Normound	r omogang canam		
1	TITON DARMASTO, S.H., M.M	tidak ada	tidak ada	tidak ada		
	Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)					

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:49:02 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 1 dari 1

Form A.03.20

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

		Hubungan Keluarga		
No	Nama Anggota Direksi	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	TITON DARMASTO, S.H., M.M	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:49:12 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 1 dari 1

Form A.04.10 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:49:24 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 1

Form A.04.20

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)			
1						
	Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)					

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:49:37 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 1

Form A.05.10

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	HARYANTI, S.Sn., M.Si	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Drs. SUHARNO,M.M., Akt	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:49:49 WIB Dicetak Oleh joenatan 2022@gmail.com 1 dari 1

Form A.05.20

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

		Hubungan Keluarga		
No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	HARYANTI, S.Sn., M.Si	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Drs. SUHARNO,M.M., Akt	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:50:03 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 1 dari 1

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewa	an Komisaris
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	12505000	2	58749864
2	Tunjangan	1	58449116	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		70954116		58749864

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:50:15 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 1

Form A.06.20

Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)		
		Direksi	Dewan Komisaris	
1	Perumahan	Direktur Utama 150.060.000/tahun	-	
2	Transportasi	Direktur Utama sewa kendaraan 179.741.752/Tahun	-	
3	Asuransi Kesehatan	Direktur Utama 7.200.000/tahun	-	
4	Fasilitas lainnya	-	-	

Footer 1

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:50:26 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 1

Form A.07.00 Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

1 dari 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

		Perban	dingan
No	Keterangan	(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,18	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	6,96	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:50:38 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com

Form A.08.10 Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	20-01-2023	2	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pelaksanaan Semester II 2022
2	06-04-2023	2	Isue-isue strategis, Evaluasi Kebijakan Strategis, Evaluasi Realisasi Bisnis Triwulan 1 tahun 2023
3	10-05-2023	7	Isue-isue strategis, Evaluasi Kebijakan Strategis, Evaluasi Realisasi Bisnis Triwulan 1 tahun 2023
4	20-10-2023	2	Isue-isue strategis, Evaluasi Kebijakan Strategis, Evaluasi Realisasi Bisnis Triwulan 3 tahun 2023
5	20-11-2023	2	Rapat Koordinasi dengan PE Al dan PE PE Kepatuhan tentang Kebijakan Terbaru BPR
6	16-12-2023	6	Komitmen RBB Tahun 2023
7	22-12-2023	6	Exit Meeting Audit OJK Tahun 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:50:54 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 1

Form A.08.20 Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Footer 1



Rutin

: PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen Nama Lembaga Jasa Keuangan

: 31 Desember 2023 Posisi Laporan

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuens	si Kehadiran	Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	HARYANTI, S.Sn., M.Si	7	0	100,00
2	Drs. SUHARNO,M.M., Akt	7	0	100,00

	,	Ü	100,00				
	7	0	100,00				
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)							

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:51:11 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com

Form A.10.00

Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)		
	Perdata	Pidana	
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0	
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	
Total	0	0	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:51:38 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 1

Form A.11.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:51:52 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 1

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230516	Kegiatan Sosial	Bantuan Jambanisasi 1 unit Desa Bukuran Kalijambe	Desa Bukuran Kalijambe	3.000.000
2	20230630	Kegiatan Sosial	Bantuan Sembako Ramadhan	Bantuan Sembako Ramadhan	53.500.000
3	20230711	Kegiatan Sosial	Bantuan Jambanisasi 1 unit Desa Kedawung Mondokan	Bantuan Jambanisasi 1 unit Desa Kedawung Mondokan	3.000.000
4	20230831	Kegiatan Sosial	Tuntaskan Kemiskinan	Tuntaskan Kemiskinan	20.700.000
5	20230831	Kegiatan Sosial	Bantuan Air Bersih	Bantuan Air Bersih	500.000
6	20230913	Kegiatan Sosial	Beasiswa kepada Duta Genre Kab Sragen	Beasiswa kepada Duta Genre Kab Sragen	16.000.000
7	20230925	Kegiatan Sosial	Bantuan Air Bersih	Bantuan Air Bersih	500.000
8	20230927	Kegiatan Sosial	Bantuan Jambanisasi 1 unit	Bantuan Jambanisasi 1 unit	3.000.000
9	20230927	Kegiatan Sosial	Bantuan Jambanisasi 1 unit	Bantuan Jambanisasi 1 unit	3.000.000
10	20231003	Kegiatan Sosial	Bantuan Air Bersih	Bantuan Air Bersih	1.000.000
11	20231026	Kegiatan Sosial	Bantuan Pembuatan Sumur Dalam Desa Genengsari Banyurip	Bantuan Pembuatan Sumur Dalam Desa Genengsari Banyurip	25.000.000
12	20231117	Kegiatan Sosial	Bantuan Perlengkapan Alat Tulis 217 Anak Asuh LGNOTA	Bantuan Perlengkapan Alat Tulis 217 Anak Asuh LGNOTA	11.320.500
13	20231129	Kegiatan Sosial	Bantuan CSR Branding Bus Sekolah Rute Galeh - Tangen	Bantuan CSR Branding Bus Sekolah Rute Galeh - Tangen	27.000.000
14	20231129	Kegiatan Sosial	Bantuan CSR Halte Trans Jateng Halte Gerbang 2 Sangiran	Bantuan CSR Halte Trans Jateng Halte Gerbang 2 Sangiran	26.000.000
15	20231130	Kegiatan Sosial	CSR Donor Darah	CSR Donor Darah	22.808.480
16	20231212	Kegiatan Sosial	Bantuan CSR Bibit Tanaman Produktif Mondokan Sragen	Bantuan CSR Bibit Tanaman Produktif Mondokan Sragen	2.997.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:52:08 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 2

Form A.12.00

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:52:08 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 2 dari 2

Form B.00.00

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31-12-2023

Alamat : Jl. Sukowati No.249, Karang Duwo, Sragen Tengah, Kec. Sragen,

Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57211

Nomor Telepon : (0271) 892662

Modal Inti BPR : 42.454.530.641,00

Total Aset BPR : 391.716.181.320,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,1

Peringkat Komposit : 1

Analisis : Struktur organisasi Bank Djoko Tingkir masih cukup sederhana,

diharapkan penerapan GCG di Bank Djoko Tingkir dapat terpantau dengan baik dan sesuai ketentuan Terjaganya kondisi BMPK

memberikan dampak positif bagi BPR Bank Djoko Tingkir,

diharapkan kondisi ini terus terjaga dengan baik. Bank Djoko Tingkir

diharapkan terus menunjukan transparansi keuangan dan non keuangan sebagai acuan untuk para stakeholder dan menjaga

kepercayaan dari semua pihak

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:52:21 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 1

Form B.00.01

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,40	0,10	1,09	0.218	
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,67	0,40	0,10	1,17	0.176	
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,60	0,40	0,07	1,07	0.107	
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,50	0,50	0,13	1,13	0.113	
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	
Nilai Komposit						1.1	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:52:42 WIB Dicetak Oleh joenatan 2022@gmail.com 1 dari 1

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang, namun saat ini telah dilakukan pemenuhan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda namun pada satu propinsi yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan baik jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	semua direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota direksi maupun dengan anggota dewan komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi menggunakan penasehat baik penasehat perorangan maupun jasa profesional.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	semua anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan serta telah diangkat melalui RUPS.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,59	

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:52:58 WIB Dicetak Oleh joenatan 2022@gmail.com 1 dari 6

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:52:58 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 2 dari 6

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen serta tidak memberikan kuasa yang bersifat umum.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK dan atau otoritas lain
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi telah menyajikan data dan informasi lengkap akurat terkini kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Direksi telah mengambil keputusan yang berseifat strategis dengan cara musyawarah mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lain yang di tetapkan dalam RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Anggota Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, seperti misalkan pemahaman prinsip kehati hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman kerja tata tertib minimal etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:52:58 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 3 dari 6

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:52:58 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 4 dari 6

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	telah terdapat peningkatan namun belum secara komprehensif kepada pegawai.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan tata kelola pada OJK, asosiasi BPR.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:52:58 WIB Dicetak Oleh joenatan 2022@gmail.com 5 dari 6

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:52:58 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 6 dari 6

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Bank Djoko Tingkir Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan, namun Bank Djoko Tingir proses pemenuhan Direktur YMFK
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bank Djoko Tingkir dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Anggota Dewan Komisaris merangkap BPR Lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:53:18 WIB Dicetak Oleh joenatan 2022@gmail.com 1 dari 6

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:53:18 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 2 dari 6

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh Komisaris Bank Djoko Tingkir Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR,
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Telah melaksanakan dan menindaklanjutu temuan audit
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:53:18 WIB Dicetak Oleh joenatan 2022@gmail.com 3 dari 6

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:53:18 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 4 dari 6

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	apat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat,
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:53:18 WIB Dicetak Oleh joenatan 2022@gmail.com 5 dari 6

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:53:18 WIB Dicetak Oleh joenatan 2022@gmail.com 6 dari 6

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:53:37 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 1 dari 4

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:53:37 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 2 dari 4

Rutin

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:53:37 WIB Dicetak Oleh joenatan 2022@gmail.com 3 dari 4

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:53:37 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 4 dari 4

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	Bank Djoko Tingkir telah memiliki Sistem dan Prosedur Penyelesaian Benturan Kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Seluruh Pengurus Bank Djoko Tingkir tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak terdaoat benturan kepentinga
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:54:08 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:54:08 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 2 dari 4

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:54:08 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:54:08 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 4 dari 4

Rutin

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.		
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Telah tersedia Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja. sistem. dan prosedur kepatuhan. Terlaksana
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas. wewenang. dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,50	

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:54:25 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 1 dari 6

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:54:25 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 2 dari 6

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan. ketentuan. sistem. dan prosedur. serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan. ketentuan. sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	Bank Djoko Tingkir telah berhasil berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:54:25 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 3 dari
 6

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:54:25 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 4 dari 6

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Bank Djoko Tingkir telah berhasil meminimkan risiko pelanggaran khususnya bidang Perbankan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terdapat laporan Khusus yang disampaikan Oleh Direktur YMFK
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:54:25 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 5 dari 6

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:54:25 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 6 dari 6

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan	1	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	fungsi audit intern.		
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:54:50 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 6

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:54:50 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 2 dari 6

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bank Djoko Tingkir memiliki modal modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit. penyusunan program audit. pelaksanaan audit. pelaporan hasil audit. dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bank Djoko Tingkir memiliki modal modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah)

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:54:50 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:54:50 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 4 dari 6

Rutin

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:54:50 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:54:50 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 6 dari 6

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Bank Djoko Tingkir telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja. ruang lingkup audit. standar profesional akuntan publik. dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Bank Djoko Tingkir pelaksanaan audit laporan keuangan BPR. BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah belum melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. dikarenakan masih proses audit Eksternal
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	BPR telah belum melaporkan hasil audit KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan. dikarenakan masih proses audit Eksternal
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah belum melaporkan hasil audit KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan. dikarenakan masih proses audit Eksternal

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:55:36 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 1 dari 4

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:55:36 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 2 dari 4

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:55:36 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:55:36 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 4 dari 4

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;	1	Bank Djoko Tingkir memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.		
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	Bank Djoko Tingkir memiliki kebijakan Manajemen Risiko. prosedur Manajemen Risiko. dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	Bank Djoko Tingkir kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:56:11 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 1 dari 6

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:56:11 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 2 dari 6

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris menyetujui dan Mengevaluasi kebijakan manajemen Risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	Bank Djoko Tingkir melakukan proses identifikasi. pengukuran. pemantauan. dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	Bank Djoko Tingkir menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Djoko Tingkir menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Bank Djoko Tingkir memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap. akurat. kini. dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Djoko Tingkir menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Djoko Tingkir menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:56:11 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 3 dari 6

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:56:11 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 4 dari 6

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:56:11 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 5
 dari
 6

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

6 dari 6 Tanggal Cetak 31/01/2024 14:56:11 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	Bank Djoko Tingkir telah memiliki kebijakan. sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait. debitur grup. dan/atau debitur besar. berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	Bank Djoko Tingkir secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan. sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Djoko Tingkir tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:56:29 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com

 1
 dari
 4

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:56:29 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 2 dari 4

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:56:29 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:56:29 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 4 dari 4

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia. teknologi informasi. jaringan kantor. kebijakan. dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana Bisnis Bank Djoko Tingkir telah disusun dan dipertimbangan dengan matang
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:56:45 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 1 dari 4

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:56:45 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 2 dari 4

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:56:45 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:56:45 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 4 dari 4

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	bank Djoko Tingkir memiliki istem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap. akurat. kini. dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Djoko Tingkir menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan. informasi lainnya. susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	bank Djoko Tingkir menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum. laporan keuangan. opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada). seluruh aspek transparansi dan informasi. serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	bank Djoko tingkir melaksanakan transparansi informasi mengenai produk. layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	bank Djoko tingkir menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara. jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:57:01 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com
 1 dari 4

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:57:01 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 2 dari 4

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Djoko Tingkir telah melaksanakan dan Melaporkan Laporan tersebut
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Bank Djoko Tingkir telah melaksanakan dan Melaporkan Laporan tersebut
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

 Tanggal Cetak
 31/01/2024 14:57:01 WIB
 Dicetak Oleh
 joenatan2022@gmail.com

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Tanggal Cetak 31/01/2024 14:57:01 WIB Dicetak Oleh joenatan2022@gmail.com 4 dari 4

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN

Kami selaku Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen menyetujui dan menandantangani:

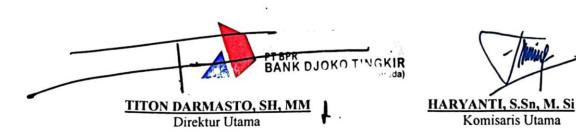
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA) KABUPATEN SRAGEN

SEMESTER II TAHUN 2023

Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen mengharapkan agar seluruh Pengurus dan Pegawai dapat menjalankan dan menerapkan Tata Kelola yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sragen, 30 Januari 2024





KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN TATA KELOLA

NAMA BPR : **PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)**

ALAMAT : JL RAYA SUKOWATI NO 249 SRAGEN

NO TELP : (0271) 892662

POSISI LAPORAN : 31 Desember 2022

MODAL INTI : Rp 42.454.530.641,
TOTAL ASET : Rp 391.716.181.320,-

STATUS AUDIT : Proses Audit KAP (UnAudit)

BOBOT BPR : B

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA		
Nilai Peringkat Komposit		
1,10 (satu koma satu nol)	1 (Satu) Sangat Baik	
ANALIS KESIMPULAN		

Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance.

- 1. Laporan mengenai hasil Self-Assessment Bank Djoko Tingkir telah diberikan kepada OJK dengan nilai predikat komposit 1.1 (Sangat Baik).
- 2. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan, namun masih ada beberaoa yang belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :
 - a. Ketentuan Otoritas Jasa keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi maupun Dewan Komisaris dapat dipenuhi oleh Bank dan Bank Djoko Tingkir saat ini telah membuka recruitme Direktur Pemasaran dan Direktur YMFK yang dilakukan di Bulan Januari 2024, harapan di tahun 2024 telah terpenuhi.
 - b. Bank telah membuat SOP *Good Corporate Governance (GCG)*, diharapkan kedepan tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Bank telah membuat pembagian tugas Direksi yang ditetapkan dalam RUPS, sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
 - d. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
 - e. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau

mengurangi keuntungan Bank.

- f. Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif sesuai ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
- g. Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman audit yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
- h. Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- i. Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK.
- j. Tidak ada penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan serta apabila ada pelanggaran dan atau pelampauan BMPK akan segera dilaporkan ke OJK.
- k. Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti debitur atau nasabah BPR.
- 1. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan
- m. Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Jangka Pendek yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi Misi BPR.
- n. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa keuangan atau lembaga lain yang terkait dalam rangka Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan melalui website BPR dengan Alamat www.bprdjokotingkir.com

Demikian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR (Good Corporate Governance), terutama Pasal 75 & 77 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Atas kerja-sama dan perhatian yang diberikan kami ucapkan terima-kasih

Sragen, 30 Januari 2024

TITON DARMASTO, SH, MM
Direktur Utama

HARYANTI, S.Sn, M. Si Komisaris Utama